



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI SUBOKO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **242681**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.325.000.000**

1. Tanah Seluas 1450 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4141 m2/1000 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 3824 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. Tanah Seluas 3579 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah Seluas 3520 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
8. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 163.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.000.000



3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOTOR, YAMAHA 83M M/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.040.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	150.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.548.697
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.674.588.697
III. HUTANG	Rp.	254.375.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.420.213.697

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.